



RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KAB. BONE TAHUN 2024





BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) disempurnakan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1926);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 81);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone

- Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 41);
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 41).
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2024-2026.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahunberjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

BAB III
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
Bab V : Penutup.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan RKPD Tahun 2024.

Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 20 Juli 2023

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 20 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 71

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Dan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan penyusunan RAPBD maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024. Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun 2024 menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun 2024.

Usulan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Renstra PD, disusun dengan mempertimbangkan sasaran strategis PD dan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Bone serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD tahun 2024.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone tahun 2024, diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone untuk tahun 2024.

Watampone, Juli 2023

Kepala Dinas,



HJ. A. MURNIAL, S.E, M.Hum

Pangkat: Pembina Tk I

NIP. 19700808 199903 2 011

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Tahun Lalu.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Perangkat Daerah (PD).....	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone	17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	33
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	33
BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB V PENUTUP	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang membawa perubahan paradigma baru di bidang Pemerintahan utamanya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Perubahan paradigma dan tuntutan pembangunan dari sentralistik menjadi desentralistik tersebut telah memberi infikasi terhadap sistem dari praktek penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan pada khususnya di Daerah.

Proses dan mekanisme dan perencanaan akan lebih bernuansa *bottom up planing*, karena secara langsung dengan perumusan semakin besar untuk terlibat secara langsung dengan perumusan dan aplikasi terhadap berbagai konsepsi perencanaan dan aktifitas pembangunan termasuk di dalamnya pembangunan dan pengembangan sektor budaya daerah.

Kabupaten Bone yang kaya dan sangat potensial budaya dan sejarah serta indikator seperti tersedianya akomodasi dan sarana budaya lainnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, diperlukan adanya perencanaan secara bertahap dan berkesinambungan, yaitu dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dalam kurun waktu tertentu, seperti Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dibahas pada urian dibawah ini.

Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran menitik beratkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone. Rencana Kerja Tahun 2024 dengan program dan kegiatan yang mengakomodir urusan Kebudayaan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaraan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
28. Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone No. 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kab.Bone Tahun 2018-2023

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencan Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun 2023 ini adalah dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan strategis serta kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Starategis (RENSTRA) Tahun 2014-2026.

Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Rencana pelaksanaan Pembangunan Daerah, serta tugas lain yang diberikan kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone sesuai aturan yang berlaku.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen rencana kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I :Pendahuluan Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, beserta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan Memuat rumusan tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran beserta gambaran umum program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan

BAB IV : Rencana Kerja Pendanaan Perangkat DaerahMenyajikan gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang program dan kegiatan, lokasi, kelompok sasaran beserta pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

BAB V : **Penutup**Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun perencanaan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi terhadap capaian Rencana Kerja Tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai perencanaan target kinerja sasaran strategis dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone pada tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dinilai hasil capaian kinerjanya dan dipelajari hambatan dan kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya. Proses evaluasi ini dilakukan terhadap capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja dan Perjanjian Kinerja antara Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dengan Bupati Bone selaku pemberi amanah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bone.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun Lalu

Dengan menggunakan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan belanja langsung dari anggaran yang telah ditetapkan di DPA-SKPD adalah Rp. -7.100.566.000

Realisasi capaian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 berdasarkan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. TC. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	22	01				PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100	-	100	100	100%			
2	22	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	-	100	100	100%			
2	22	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	-	3	3	100%	2	5	71%
2	22	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	-	1	1	100%	1	2	67%
2	22	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	3	-	1	1	100%	1	2	67%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan,Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
2	22	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	-	1	1	100%	1	2	67%
2	22	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	-	1	1	100%	1	2	67%
2	22	01	2	01	06	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	-	10	10	100%	5	15	75%
2	22	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Darah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	-	5	5	100%	4	9	69%
2	22	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	100	-	100	100	100%			
2	22	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang	42	-	14	14	100%	14	28	66%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan,Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						ASN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								
2	22	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2	22	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	-	2	-	-	1	1	25%
2	22	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	6	-	2	-	-	2	2	33%
2	22	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100	-	100	100	100%			
2	22	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	-	12	12	100%	12	24	66%
2	22	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9	-	3	3	100%	3	6	66%
2	22	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan	40	-	10	10	100%	15	25	63%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Kantor	Logistik Kantor yang Disediakan								
2	22	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36	-	12	12	100%	12	24	66%
2	22	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	-	12	12	100%	12	24	66%
2	22	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260	-	75	75	100%	85	160	62%
2	22	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	-	100	100	100%			
2	22	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23	-	3	3	100%	10	13	56%
2	22	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	-	10	10	100%	3	13	81%
2	22	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	-	100	100	100%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	22	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	-	12	12	100%	12	24	66%
2	22	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	-	12	12	100%	12	24	66%
2	22	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	-	100	100	100%			
2	22	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	-	3	3	100%	3	6	66%
2	22	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	-	5	5	100%	3	8	73%
2	22	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	-	1	-		1	1	33%
02	22	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	100	-	100	100	100%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan,Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	22	02	2	02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupetan/Kota	Cakupan Pelestarian Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupten/Kota	100	-	100	100	100%			
2	22	02	2	02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5	-	3	3	100%	1	4	80%
2	22	02	2	02	02	Pembinaan Sumber Daya Manuasia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	50	-	10	10	100%	20	30	60%
2	22	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	PERSENTASE PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	100	100	100	100	100%			
2	22	03	2	01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pimbinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupten/kota								
2	22	03	2	01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta	7	-	5	1	20%	1	2	30%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							peningkatan kapasitas tata kelola (kelompok)								
2	22	04				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	PERSENTASE PEMBINAAN SEJARAH	100	-	100	100	100%			
2	22	04	2	01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan Sejarah Lokal Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	-	100	100	100%			
2	22	04	2	01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	3	-	1	1	100%	1	2	67%
2	22	05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PERSENTASE PELESTARIAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	100	-	100	100	100%			
2	22	05	2	01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100	-	100	100	-			
2	22	05	2	01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5	-	-	-	-	-	-	-%
2	22	05	2	01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	11	-	3	3	100%	-	3	27%
2	22	05	2	02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100	-	100	100				

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan,Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	22	05	2	02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	276	-	-	-	-	138	138	30%
2	22	06				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	PERSENTASE PENGELOLAAAN PERMESIUMAN	100	-	100	100	100%			
2	22	06	2	01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Museum Kabupaten/kota yang dikelola	100	-	100	100	100%			
2	22	06	2	01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	4797	-	5	5	100%	2138	2143	45%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Perangkat Daerah (PD)

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, meliputi 1 urusan Pemerintahan, adalah sebagai berikut :

- **Urusan Wajib (Kebudayaan) :**

Melaksanakan pelayanan berkaitan dengan Kesenian dan Kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemberian anungrah kepada para seniman dan budayawan, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/festival Seni Budaya, pemberian tanda Daftar Legalisasi Sanggar Seni, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni budaya masyarakat, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan budaya tradisional melalui regulasi kesenian tradisional.

Hasil analisis pencapaian kinerja hingga Tahun 2022 serta proses pencapaian kinerja pada Tahun 2023, menjadi bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan perencanaan kegiatan pada Tahun berikutnya.

Tabel. TC. 30
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bone

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		Terlestarikannya Cagar Budaya	7	2	2	2	2	5	6	
2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)			7	2	2	2	2	3	4	
3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)			7	66	66	66	66	70	75	
4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)			5	1	1	1	1	5	7	
5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian,penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)			10	-	5	-	-	5	6	
6	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran			66	-	5	-	4	10	15	
7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data			-	-	1	-	-	1	2	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
8	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)			8	2	2	-	-	10	15	
9	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)			66	66	66	66	66	70	75	
10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum			71	500	600	500	600	700	1000	
11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan			4.300	800	1000	800	1000	100	1200	
12	Pengelolaan, Pengamanan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Museum			3	-	-	-	-			
13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya			-	5	5	-	5	6	7	
14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi			-	-	2	-	5	6	7	
15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya			5	-	2	-	5	6	7	
16	Pemetaan sdm cagar budayawan permuseuman			19	10	15	10	15	15	20	
17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota			5	10	15	10	15	15	20	
18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman			31	15	20	15	20	20	25	
19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat			4	3	4	3	2	5	7	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, adalah sebagai berikut :

- a. Tantangan yang dihadapi oleh Satuan Perangkat Daerah (PD) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di antaranya yang menonjol adalah :
 - Kurangnya kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai aset budaya bangsa.
- b. Peluang pengembangan pelayanan publik Satuan Perangkat Daerah (PD) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, diantaranya adalah :
 - Terbukanya peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan budaya menjadi sumber penghasilan.
 - Terbukanya peluang untuk pelestarian nilai-nilai budaya tradisional dan kearifan lokal sebagai aset budaya bangsa.

Secara umum diuraikan sebagai berikut :

1. Pada Dinas Kebudayaan
 - a. Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni dan budaya.
 - b. Kurang terawatnya benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan karena minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang tersedia.
 - c. Tempat untuk menggelar dan memasarkan karya seni daerah belum bisa dimanfaatkan dengan optimal.
 - d. Ketersediaan sarana dan fasilitas belum optimal dalam mendukung seni dan budaya.

Dengan melihat secara umum sebagaimana diuraikan di atas, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi dan juga hasil analisis pencapaian kinerja setiap Tahunnya maka perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bone khususnya pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ke depannya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Target kinerja tahun 2022 100% namun pencapaian kinerja 75%, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan per indikator adalah :

- Penetapan target kinerja rendah disebabkan penetapan program dan kegiatan belum sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai sasaran strategis.
- Anggaran yang tersedia belum mencukupi, sementara kepedulian dari masing-masing PD untuk membuat/menyediakan sub dominan masih rendah.

Tabel. TC. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Bone

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (minimal 76%)	100	4.468.591.072	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (minimal 76%)	100	4.468.591.072	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Hasil : Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	94.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Hasil : Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	94.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. T. Riattang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. T. Riattang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. T. Riattang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. T. Riattang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. T. Riattang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. T. Riattang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. T. Riattang	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. T. Riattang	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. T. Riattang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. T. Riattang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. T. Riattang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	67.000.000	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. T. Riattang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	67.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Darah	Kec. T. Riattang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Darah	Kec. T. Riattang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah		Hasil : Persentase Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	100	2.868.591.072	Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah		Hasil : Persentase Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	100	2.868.591.072	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.T. Riattang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org/bln	2.868.591.072	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.T. Riattang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org/bln	2.868.591.072	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Hasil : Persentase Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	105.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Hasil : Persentase Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	105.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Kab. Bone	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	75.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Kab. Bone	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	75.000.000	
	Bimbingan Teknis	Kab.	Jumlah Orang yang	4 Orang	30.000.000	Bimbingan Teknis	Kab.	Jumlah Orang yang	4 Orang	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bone	Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan			Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bone	Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Hasil : Persentase ketersediaan Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100	381.861.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Hasil : Persentase ketersediaan Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100	381.861.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. T. Riattang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	22.361.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. T. Riattang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	22.361.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. T. Riattang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	62.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. T. Riattang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	62.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. T. Riattang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	60.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. T. Riattang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	60.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. T. Riattang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. T. Riattang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. T. Riattang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. T. Riattang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Kec. T. Riattang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Kec. T. Riattang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	200.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Hasil : Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	465.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Hasil : Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	465.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.T. Riattang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	291.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.T. Riattang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	291.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kec.T. Riattang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	Pengadaan Mebel	Kec.T. Riattang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
							Riattang				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.T. Riattang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	74.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.T. Riattang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	74.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Hasil : Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	352.678.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Hasil : Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	352.678.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. T. Riattang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. T. Riattang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.800.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. T. Riattang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	343.878.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. T. Riattang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	343.878.500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Hasil : Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam	100	201.460.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Hasil : Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam	100	201.460.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Daerah		Kondisi Baik pada Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Daerah		Kondisi Baik pada Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.T. Riattang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	86.460.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.T. Riattang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	86.460.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. T. Riattang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. T. Riattang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	15.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. T. Riattang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. T. Riattang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
	Program Pengembangan Kebudayaan		Persentase Objek Budaya Lokal (Tradisi dan Ritual Adat) yang dikembangkan Sebagai Budaya	85	550.000.000	Program Pengembangan Kebudayaan		Persentase Objek Budaya Lokal (Tradisi dan Ritual Adat) yang dikembangkan Sebagai Budaya	85	550.000.000	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat		Hasil : Persentase Pengelolaan	100	175.000.000	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat		Hasil : Persentase Pengelolaan	100	175.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Bone	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	100.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Bone	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	100.000.000	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Bone	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	27 Orang	75.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Bone	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	27 Orang	75.000.000	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupetan/Kota		Hasil : Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Pelestarian Kesenian	100	225.000.000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupetan/Kota		Hasil : Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Pelestarian Kesenian	100	225.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
			Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupten/Kota					Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupten/Kota			
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Bone	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	150.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Bone	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	150.000.000	
	Pembinaan Sumber Daya Manuasia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kab. Bone	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	20 Laporan	75.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manuasia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kab. Bone	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	20 Laporan	75.000.000	
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone	Hasil : Persentase Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	150.000.000	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone	Hasil : Persentase Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	150.000.000	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kab. Bone	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	75.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kab. Bone	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	75.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kab. Bone	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	10 Orang	75.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kab. Bone	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	10 Orang	75.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan sebagai Budaya	92	210.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan sebagai Budaya	92	210.000.000	
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Hasil : Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	210.000.000	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Hasil : Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	210.000.000	
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Bone	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	20 Orang	70.000.000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Bone	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	20 Orang	70.000.000	
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya	Kab. Bone	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian	20	70.000.000	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya	Kab. Bone	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian	20	70.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat		Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat		
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Bone	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	10 Lembaga	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Bone	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	10 Lembaga	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Persentase Sejarah Lokal yang Dibina untuk Kelestariannya	90	500.000.000	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Persentase Sejarah Lokal yang Dibina untuk Kelestariannya	90	500.000.000	
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Hasil : Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	500.000.000	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Hasil : Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	500.000.000	
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Bone	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	10 Orang	166.000.000	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Bone	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	10 Orang	166.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Kab. Bone	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	10 Unit	168.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Kab. Bone	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	10 Unit	168.000.000	
	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap	Kab. Bone	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah	3 Dokumen	166.000.000	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap	Kab. Bone	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah	3 Dokumen	166.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Data dan Informasi Sejarah		yang Dapat Diakses Masyarakat			Data dan Informasi Sejarah		yang Dapat Diakses Masyarakat			
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		Persentase Objek Cagar Budaya Daerah Yang Dijaga Kelestariannya Melalui Perlindungan, Pengembangan, Dan Pemanfaatan	95	290.000.000	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		Persentase Objek Cagar Budaya Daerah Yang Dijaga Kelestariannya Melalui Perlindungan, Pengembangan, Dan Pemanfaatan	95	290.000.000	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Hasil : Persentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan Keluaran : Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan	100	140.000.000	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Hasil : Persentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan Keluaran : Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan	100	140.000.000	
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kab. Bone	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	12 Objek	75.000.000	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kab. Bone	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	12 Objek	75.000.000	
	Penetapan Cagar Budaya	Kab. Bone	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	65.000.000	Penetapan Cagar Budaya	Kab. Bone	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	65.000.000	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Hasil : Persentase Cagar Budaya yang dikelola Peringkat Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Cagar Budaya yang dikelola Peringkat	100	150.000.000	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Hasil : Persentase Cagar Budaya yang dikelola Peringkat Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Cagar Budaya yang dikelola Peringkat	100	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
			Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota			
	Pengembangan Cagar Budaya	Kab. Bone	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	5 Objek	150.000.000	Pengembangan Cagar Budaya	Kab. Bone	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	5 Objek	150.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Persentase Koleksi Museum Daerah Yang Terkelola Dan Terjaga Kelestariannya	96	450.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Persentase Koleksi Museum Daerah Yang Terkelola Dan Terjaga Kelestariannya	96	450.000.000	
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		Hasil : Persentase Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	100	450.000.000	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		Hasil : Persentase Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	100	450.000.000	
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Kab. Bone	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	140 Unit	100.000.000	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Kab. Bone	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	140 Unit	100.000.000	
	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kab. Bone	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5 Orang	120.000.000	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kab. Bone	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5 Orang	120.000.000	
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kab. Bone	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	10 Unit	50.000.000	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kab. Bone	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	10 Unit	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan& Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kab. Bone	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	10 Unit	30.000.000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kab. Bone	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	10 Unit	30.000.000	
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Kab. Bone	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	10 Unit	150.000.000	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Kab. Bone	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	10 Unit	150.000.000	

2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone secara langsung terlibat dengan kegiatan masyarakat dan organisasi lainnya selaku stakeholder eksternal Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, hingga saat ini Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone mendapatkan usulan - program dan - kegiatan dari beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Tabel. TC. 32
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sesuai Hasil Musrenbang Kecamatan dan Pokir DPRD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	PROGRAM PELESTARIAN & PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase Objek Cagar Budaya Daerah Yang Dijaga Kelestariannya Melalui Perlindungan, Pengembangan, Dan Pemanfaatan		
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab/kota		Jumlah Cagar Budaya yang dikelola Peringkat Kabupaten/Kota		
	Pengembangan Cagar Budaya	6 Kecamatan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	16 Objek	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan sebagai Budaya		
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab/Kota		Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Se Kab. Bone	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	3 Kelompok	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase Objek Budaya Lokal (Tradisi dan Ritual Adat) yang dikembangkan Sebagai Budaya		
	Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kab/Kota		Jumlah Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, lembaga, dan Pranata Adat	27 Kecamatan	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	4 Kali	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone yaitu atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah kemudian juga pada peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategis Nasional pencegahan dan pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjabarkan dan melaksanakan strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui aksi pencegahan pemberantasan korupsi, termasuk didalamnya pungutan liar (pungli) dan gratifikasi.

Selain dari pada itu juga terdapat program Nasional yaitu dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi secara Nasional, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kemudian pada peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012 tentang pedoman pengusulan, penetapan dan pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah serta peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara on line.

Hingga saat ini Program dan Kegiatan yang terkait kebijakan Nasional tersebut belum terlaksana secara optimal. Kedua kebijakan dan program Nasional tersebut diatas masih menjadi pekerjaan rumah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone yang perlu dijadikan sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone disertai dukungan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya dalam penerapan system pengendalian internal dalam penyelenggaraan setiap urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bone.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Deaerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Dan Kinerja Pelestarian Budaya Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan	Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah Dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)
	Meningkatnya Warisan Budaya Daerah Yang Dilestarikan	Persentase Warisan Budaya Daerah Yang Dijaga Kelestariannya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Budaya Lokal (Tradisi Dan Ritual Adat) Yang Dikembangkan Sebagai Budaya
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional Yang Dikembangkan Sebagai Budaya
			Program Pembinaan Sejarah	Persentase Sejarah Lokal Yang Dibina Untuk Kelestariannya
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan	Persentase Objek Cagar Budaya Daerah Yang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
			Cagar Budaya	Dijaga Kelestariannya Melalui Perlindungan, Pengembangan, Dan Pemanfaatan
	Meningkatnya Standar Museum	Hasil Standarisasi Museum	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Koleksi Museum Daerah Yang Terkelola Dan Terjaga Kelestariannya

CASCADING DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE PERIODE TAHUN 2024

Tujuan Rpd 2024-2026	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Semakin Baik Dan Berorientasi Pelayanan	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Inklusif				
Indikator Tujuan Rpd 2024-2026	Indeks Reformasi Birokrasi	Persentase Penduduk Miskin				
Sasaran Rpd 2024-2026	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kinerja Pemerintah Daerah	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
Indikator Sasaran Rpd 2024-2026	Nilai SAKIP Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia				
Tujuan Renstra OPD	MENINGKATKAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PELESTARIAN BUDAYA DAERAH					
Indikator Tujuan Renstra OPD	Hasil Evaluasi Sakip Oleh Apip	Persentase Warisan Budaya Daerah Yang Diakui Secara Nasional				
Sasaran Renstra OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan	Meningkatnya Warisan Budaya Daerah Yang Dilestarikan				Meningkatnya Standar Museum
Indikator Sasaran Renstra OPD	Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP	Persentase Warisan Budaya Daerah Yang Dijaga Kelestariannya				Hasil Standarisasi Museum
Pogram	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pengembang an Kesenian Tradisional	Program Pembinaan Sejarah	Program Pengelolaan Permuseuman
Sasaran Program	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Terlaksananya Pelestarian Pengelolaan Cagar Budaya	Terselenggara nya Pengembang an Kesenian Dan Pelaku Seni Dalam Daerah	Terlaksananya Pelestarian Pembinaan Sejarah Lokal Dalam Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Permuseuman
Indikator Program	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah Dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Persentase Objek Budaya Lokal (Tradisi Dan Ritual Adat) Yang Dikembangkan Sebagai Budaya	Persentase Objek Cagar Budaya Daerah Yang Dijaga Kelestariannya Melalui	Persentase Kesenian Tradisional	Persentase Sejarah Lokal Yang Dibina	Persentase Koleksi Museum

											Perlindungan, Pengembangan, Dan Pemanfaatan	Yang Dikembangkan Sebagai Budaya	Untuk Kelestariannya	Daerah Yang Terkelola Dan Terjaga Kelestariannya	
Penanggungjawab Kegiatan	Sekretariat							Bidang Adat Dan Tradisi			Bidang Sejarah Purbakala Dan Cagar Budaya		Bidang Kesenian	Bidang Dokumentasi & Promosi Budaya	Upt Museum
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Jenis Dokumen yang wajib disusun sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Teraksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Teraksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Teraksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Teraksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Teraksananya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan	Hasil : Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan	Hasil : Persentase Ketersediaan Laporan Pelaksanaan	Hasil : Persentase Ketersediaan Laporan Pelaksanaan	Hasil : Persentase Ketersediaan Laporan Pelaksanaan	Hasil : Persentase Ketersediaan Barang	Hasil : Persentase Ketersediaan Jasa	Hasil : Persentase Ketersediaan Barang Milik	Hasil : Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang	Hasil : Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional	Hasil : Persentase Lembaga Adat yang Penganutnya	Hasil : Persentase Cagar Budaya	Hasil : Persentase Cagar Budaya	Hasil : Persentase Pembinaan Kesenian	Hasil : Persentase Pembinaan Sejarah Lokal	Hasil : Persentase Pengelolaan Museum

	n, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran Jumlah Laporan Pelaksanaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	n Administra si Kepegawai an pada Perangkat Daerah Keluaran Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	ediaan Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Keluaran Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan adminstrasi umum Perangkat Daerah	Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Keluaran Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah Keluaran Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah Keluaran Jumlah Laporan Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Keluaran Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupten/K ota Keluaran Jumlah Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	ya dalam Daerah Kabupaten /Kota Keluaran Jumlah Lembaga Adat yang Penganutny a dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peringkat Kabupaten/K ota yang ditetapkan Keluaran Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/K ota yang ditetapkan	yang dikelola Peringkat Kabupate n/Kota Keluaran Jumlah Cagar Budaya yang dikelola Peringkat Kabupaten /Kota	yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Keluaran Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/K ota	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/K ota Keluaran Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	Kabupaten/K ota Keluaran Jumlah Pengelolaan Museum Kabupaten/K ota
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembanga n, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pelindungan, Pengembang an, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Pengemban gan Cagar Budaya	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kot a	Pelindungan, Pengembang an, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
Sasaran sub kegiatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembanga n, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya a Pelindungan, Pengembang an, Pemanfaatan Objek Pemajuan	Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksanak annya Pengemban gan Cagar Budaya	Terlaksananya a Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Tersedianya Pelindungan, Pengembang an, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu

							Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Lembaga Adat					
Indikator Sub. Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dikembangkan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan Kompetisinya)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu
Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Mebel	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Penetapan Cagar Budaya		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
Sasaran Sub. Kegiatan	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Mebel	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Terselenggaranya Penetapan Cagar Budaya		Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
Indikator Sub. Kegiatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang dibina	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya

	RKA-SKPD		Undangan										Standarisasi		
Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
Sasaran Sub. Kegiatan	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang diakses Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
Indikator Sub. Kegiatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehabilitas						Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
Sasaran Sub. Kegiatan	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan											Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

Indikator Sub. Kegiatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan											Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara
Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
Sasaran Sub. Kegiatan	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
Indikator Sub. Kegiatan	umlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan											Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi
Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

	Kinerja SKPD														
Sasaran Sub. Kegiatan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
Indikator Sub. Kegiatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
Sub. Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Sasaran Sub.	Terlaksananya Evaluasi														

Kegiatan	Kinerja Perangkat Daerah														
Indikator Sub. Kegiatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

BAB IV

RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone periode Tahun 2023, maka perlu di adakan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun 2024 yang direncanakan senilai :Rp **6.468.591.072**

Berdasarkan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun 2023, maka perlu di rencanakan sumber dana Program dan Kegiatan yang dasarnya terdiri dari Program dan Kegiatan Utama.

Program dan Kegiatan yang memiliki indikator dan target Kinerja Utama dalam pencapaian sasaran strategis yang akan di capai setiap tahunnya adalah untuk mewujudkan tujuan jangka menengah, sedangkan Program dan Kegiatan pendukung merupakan Program dan Kegiatan Rutin (Organik) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan utama organisasi yang direncanakan dan sasaran yang ingin di capai pada Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Secara lengkap, rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun 2024 kedepannya diperlukan kebijakan anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, dengan mempertimbangkan sumber-sumber penganggaran lainnya yang tidak hanya bersumber dari DAU-APBD Kabupate Bone

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang akan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu Program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada Rencan Kerja Tahun 2024 pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun 2023, direncanakan terdiri dari 6 Program 15 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut

TABEL TC. 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KODE						Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	22	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (minimal 76%)		100	4.468.591.072			100	4.914.550.179
2	22	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil : Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		100	94.000.000			100	102.500.000
2	22	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. T. Riattang	3 Dokumen	8.000.000	DAU		3 Dokumen	8.800.000
2	22	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. T. Riattang	1 Dokumen	2.500.000	DAU		1 Dokumen	2.750.000
2	22	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan	Kec. T. Riattang	1 Dokumen	2.000.000	DAU		1 Dokumen	2.200.000

KODE						Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
2	22	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. T. Riattang	1 Dokumen	2.500.000	DAU		1 Dokumen	2.750.000
2	22	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. T. Riattang	1 Dokumen	2.000.000	DAU		1 Dokumen	2.200.000
2	22	01	2	01	06	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	umlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. T. Riattang	6 Laporan	67.000.000	DAU		7 Laporan	73.700.000
2	22	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. T. Riattang	4 Laporan	10.000.000	DAU		5 Laporan	10.100.000
2	22	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil : Persentase Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	2.868.591.072	DAU		100	3.155.450.179

KODE						Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah							
2	22	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. T. Riattang	14 Org/bln	2.868.591.072	DAU		14 Org/bln	3.155.450.179
2	22	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Hasil : Persentase Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	105.000.000			100	115.500.000
2	22	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bone	3 Orang	75.000.000	DAU		4 Orang	82.500.000
2	22	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	umlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bone	4 Orang	30.000.000	DAU		5 Orang	33.000.000
2	22	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil : Persentase ketersediaan		100	381.861.500			100	420.047.650

KODE						Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
2	22	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. T. Riattang	12 Paket	22.361.500	DAU		12 Paket	24.597.650
2	22	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. T. Riattang	5 Paket	62.000.000	DAU		6 Paket	68.200.000
2	22	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. T. Riattang	20 Paket	60.000.000	DAU		20 Paket	66.000.000
2	22	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. T. Riattang	12 Paket	35.000.000	DAU		12 Paket	38.500.000
2	22	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. T. Riattang	12 Dokumen	2.500.000	DAU		12 Dokumen	2.750.000
2	22	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bone	100 Laporan	200.000.000	DAU		100 Laporan	220.000.000

KODE						Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	22	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Hasil : Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	465.000.000			100	511.500.000
2	22	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. T. Riattang	1 Unit	291.000.000	DAU		4 Unit	320.100.000
2	22	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. T. Riattang	10 Unit	100.000.000	DAU		10 Unit	110.000.000
2	22	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. T. Riattang	5 Unit	74.000.000	DAU		7 Unit	81.400.000
2	22	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil : Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	352.678.500			100	387.946.350

KODE						Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2	22	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. T. Riattang	12 Laporan	8.800.000	DAU		12 Laporan	9.680.000
2	22	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. T. Riattang	12 Laporan	343.878.500	DAU		12 Laporan	378.266.350
2	22	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil : Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	201.460.000			100	221.606.000
2	22	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kec. T.	3 Unit	86.460.000	DAU		3 Unit	95.106.000

KODE						Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Riattang						
2	22	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. T. Riattang	5 Unit	15.000.000	DAU		6 Unit	16.500.000
2	22	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. T. Riattang	1 Unit	100.000.000	DAU		1 Unit	110.000.000
2	22	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Budaya Lokal (Tradisi dan Ritual Adat) yang dikembangkan Sebagai Budaya		85	550.000.000			90	595.000.000
2	22	02	2	01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Hasil : Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100	175.000.000			100	192.500.000
2	22	02	2	01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang	Kab. Bone	2 Objek	100.000.000	DAU		3 Objek	110.000.000

KODE						Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kebudayaan	Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan							
2	22	02	2	01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Bone	27 Orang	75.000.000	DAU		27 Orang	82.500.000
2	22	02	2	02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupetan/Kota	Hasil : Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupten/Kota		100	225.000.000			100	237.500.000
2	22	02	2	02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	umlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kab. Bone	10 Objek	150.000.000	DAU		10 Objek	155.000.000
2	22	02	2	02	02	Pembinaan Sumber Daya Manuasia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan	Kab. Bone	20 Laporan	75.000.000	DAU		20 Laporan	82.500.000

KODE						Uraan/Bidang Urusan Pemerintahan Dareah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pranata Tradisional							
2	22	02	2	03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Hasil : Persentase Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100	150.000.000			100	165.000.000
2	22	02	2	03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kab. Bone	3 Objek	75.000.000	DAU		4 Objek	82.500.000
2	22	02	2	03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Kab. Bone	10 Orang	75.000.000	DAU		11 Orang	82.500.000
2	22	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan sebagai Budaya		92	210.000.000			95	231.000.000
2	22	03	2	01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Hasil : Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Pembinaan Kesenian		100	210.000.000			100	231.000.000

KODE						Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
2	22	03	2	01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kab. Bone	20 Orang	70.000.000	DAU		21 Orang	77.000.000
2	22	03	2	01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Kab. Bone	20 Sertifikat	70.000.000	DAU		21 Sertifikat	77.000.000
2	22	03	2	01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Bone	10 Lembaga	70.000.000	DAU		11 Lembaga	77.000.000
2	22	04				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah Lokal yang Dibina untuk Kelestariannya		90	500.000.000			95	550.000.000
2	22	04	2	01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Hasil : Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah		100	500.000.000			100	550.000.000

KODE						Uraan/Bidang Urusan Pemerintahan Dareah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
2	22	04	2	01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Kab. Bone	10 Orang	166.000.000	DAU		11 Orang	182.600.000
2	22	04	2	01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Kab. Bone	10 Unit	168.000.000	DAU		11 Unit	184.800.000
2	22	04	2	01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Kab. Bone	3 Dokumen	166.000.000	DAU		4 Dokumen	182.600.000
2	22	05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Objek Cagar Budaya Daerah Yang Dijaga Kelestariannya Melalui Perlindungan, Pengembangan, Dan Pemanfaatan		95	290.000.000			96	319.000.000
2	22	05	2	01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Hasil : Persentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan Keluaran : Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan		100	140.000.000			100	154.000.000

KODE						Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	22	05	2	01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Kab. Bone	12 Objek	75.000.000	DAU		13 Objek	82.500.000
2	22	05	2	01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kab. Bone	10 Objek	65.000.000	DAU		11 Objek	71.500.000
2	22	05	2	02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Hasil : Persentase Cagar Budaya yang dikelola Peringkat Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Cagar Budaya yang dikelola Peringkat Kabupaten/Kota		100	150.000.000			100	150.000.000
2	22	05	2	02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Kab. Bone	5 Objek	150.000.000	DAU		6 Objek	165.000.000
2	22	06				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Koleksi Museum Daerah Yang Terkelola Dan Terjaga Kelestariannya		96	450.000.000			97	495.000.000
2	22	06	2	01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Hasil : Persentase Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		100	450.000.000			100	495.000.000
2	22	06	2	01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan	Kab. Bone	140 Unit	100.000.000	DAU		145 Unit	110.000.000

KODE						Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Terpadu	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu							
2	22	06	2	01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Kab. Bone	5 Orang	120.000.000	DAU		6 Orang	132.000.000
2	22	06	2	01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kab. Bone	10 Unit	50.000.000	DAU		11 Unit	55.000.000
2	22	06	2	01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Kab. Bone	10 Unit	30.000.000	DAU		11 Unit	33.000.000
2	22	06	2	01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Kab. Bone	10 Unit	150.000.000	DAU		11 Unit	165.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF										6.468.591.072				7.104.550.179

BAB V

PENUTUP

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dalam menjalankan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023, masih bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone masih sangat bergantung pada sumber Dana Alokasi Umum (DAU), karena tidak adanya program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dekonsentrasi, maupun dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang diberikan untuk mendukung program kegiatan tersebut.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone sebagai Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dan RPD Kabupaten Bone Tahun 2024– 2026.